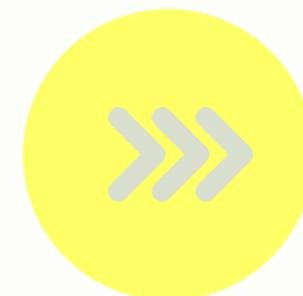




LAPORAN EKSEKUTIF

Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Nasional



Ringkasan Eksekutif Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi sesuai Analisis SKPG Rilis Agustus 2025

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi merupakan salah satu *tools early warning system* sebagai dasar kebijakan pangan dan gizi. Penyusunannya disesuaikan dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, yang disusun secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkala (bulanan).

Penyusunan bulanan paling sedikit memuat aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Sesuai hasil SKPG Rilis Agustus, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil komposit, terdapat 3 provinsi (7,90%) pada kategori “rentan” yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat. Terdapat 15 provinsi (39,47%) dalam kategori aman, dan sebanyak 20 Provinsi (52,63%) dalam kategori waspada, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.

Berdasarkan indeks ketersediaan terdapat 3 provinsi (7,90) dalam kategori “rentan”, yaitu: Sumatera Barat, Lampung dan Kalimantan Timur. Sedangkan sebanyak 16 provinsi (42,10%) dalam kategori waspada dan 19 provinsi (50,00%) dalam kategori aman. Berdasarkan indeks keterjangkauan terdapat 5 provinsi (13,16%) dalam kategori “rentan”, yaitu: Aceh, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Pegunungan. Sedangkan 21 provinsi (55,26%) pada kategori waspada dan 12 provinsi (31,58%) dalam kategori aman. Sedangkan berdasarkan indeks pemanfaatan terdapat 5 provinsi (13,16%) dalam kategori “rentan”, yaitu: Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, terdapat 10 provinsi (26,31%) pada kondisi waspada, dan 23 provinsi (60,53%) dalam kondisi aman.

Untuk mendukung analisis SKPG, terdapat informasi kondisi iklim sesuai analisis komposit BMKG dan informasi data kejadian bencana dari BNPB. Terkait dengan hasil analisis komposit iklim potensi basah dan kering dari data BMKG menunjukkan bahwa 86,38% wilayah kab/Kota di Indonesia pada kategori waspada, dan 5,25% pada kategori siaga. Selanjutnya untuk kejadian bencana, terdapat 23 provinsi (60,53%) mengalami kejadian bencana sampai dengan 10 kejadian, terdapat 7 provinsi (18,42%) mengalami kejadian bencana antara 11 – 50 kejadian, dan 7 provinsi (18,42%) tidak mengalami bencana serta terdapat 1 Provinsi (2,63%) mengalami kejadian lebih dari 50 kejadian. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, diperlukan sinergi lintas sektor baik dari pusat maupun daerah serta kerjasama kemitraan antar pemangku kepentingan untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang dijabarkan dalam laporan eksekutif ini.

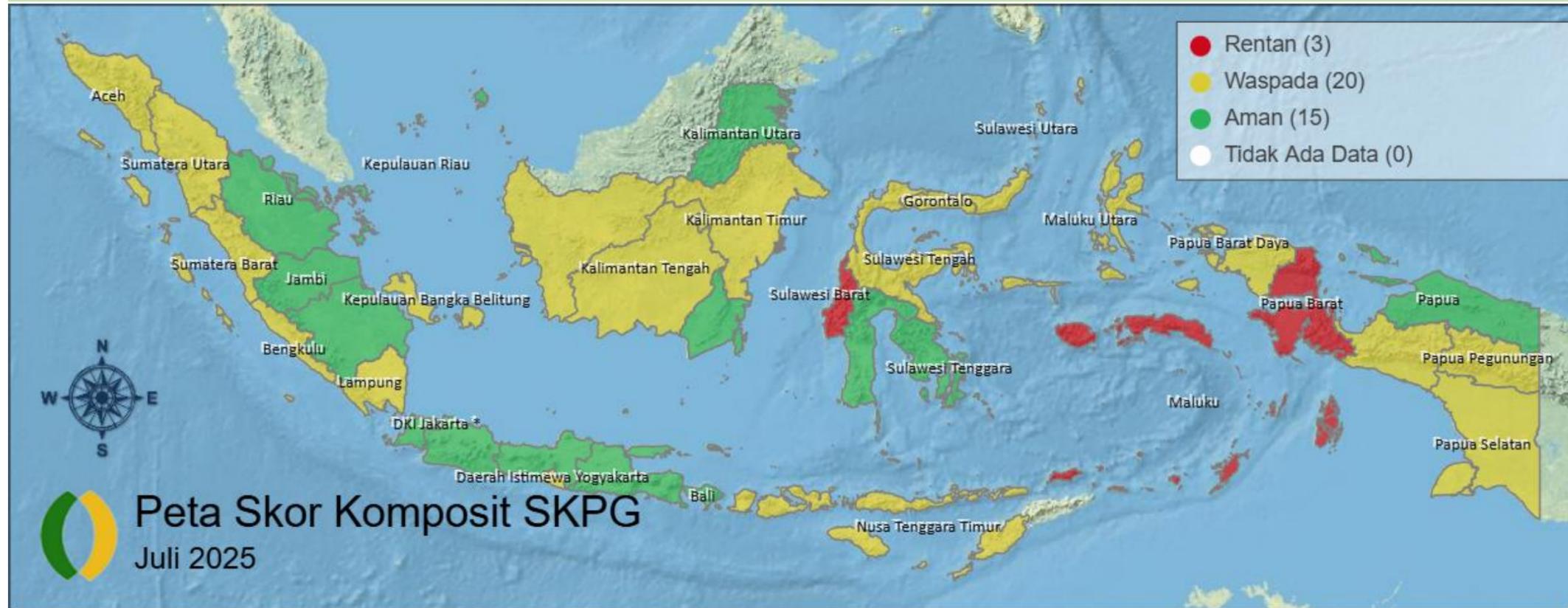
Jakarta, Agustus 2025
Plt. Sekretaris Utama



Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H.

PETA SITUASI PERINGATAN DINI KERAWANAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)

PETA KOMPOSIT SKPG NASIONAL RILIS AGUSTUS 2025



SITUASI SKPG RILIS AGUSTUS 2025*:

Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi bulanan merupakan hasil komposit dari aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan

- RENTAN**
3 Provinsi (7,90%):
Sulbar, Maluku, Papbar
- WASPADA**
20 Provinsi (52,63%):
Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung, Kep. Babel, DIY, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulut, Sulteng, Gorontalo, Malut, Papeg, Papsel, Papteng, Papua Barat Daya
- AMAN**
15 Provinsi (39,47%)

PETA ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN



- indikator 1: % luas tanam padi bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas tanam padi bulan bersangkutan 5 tahun terakhir
- indikator 2: % luas puso bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata luas puso bulan bersangkutan 5 tahun terakhir

PETA ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN



Indikator: % rata-rata harga bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata harga bulan yang sama 1 (satu) tahun sebelumnya untuk komoditas beras, minyak goreng dan telur

PETA ASPEK PEMANFAATAN PANGAN



Indikator: Status Gizi Balita yang diukur melalui persentase balita *underweight* bulan berjalan

*) SKPG Rilis Agustus 2025 disusun berdasarkan data olah Juli 2025

DETAIL SITUASI KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI PER PROVINSI

NO.	PROVINSI	IK	IA	IP	SKOR KOMPOSIT BULANAN	KETERANGAN KOMPOSIT BULANAN	INDEKS KOMPOSIT BULANAN (IKB)	NO.	PROVINSI	IK	IA	IP	SKOR KOMPOSIT BULANAN	KETERANGAN KOMPOSIT BULANAN	INDEKS KOMPOSIT BULANAN (IKB)
1	Aceh	3	1	3	7	WASPADA	2	20	Kalimantan Barat	2	3	2	7	WASPADA	2
2	Sumatera Utara	2	2	3	7	WASPADA	2	21	Kalimantan Tengah	2	2	3	7	WASPADA	2
3	Sumatera Barat	1	3	3	7	WASPADA	2	22	Kalimantan Selatan	3	3	2	8	AMAN	3
4	Riau	3	2	3	8	AMAN	3	23	Kalimantan Timur	1	3	2	6	WASPADA	2
5	Jambi	3	2	3	8	AMAN	3	24	Kalimantan Utara	3	2	3	8	AMAN	3
6	Sumatera Selatan	3	2	3	8	AMAN	3	25	Sulawesi Utara	2	1	3	6	WASPADA	2
7	Bengkulu	2	2	3	7	WASPADA	2	26	Sulawesi Tengah	3	2	2	7	WASPADA	2
8	Lampung	1	2	3	6	WASPADA	2	27	Sulawesi Selatan	3	2	3	8	AMAN	3
9	Kep. Bangka Belitung	2	2	3	7	WASPADA	2	28	Sulawesi Tenggara	3	2	3	8	AMAN	3
10	Kepulauan Riau	3	3	3	9	AMAN	3	29	Gorontalo	2	2	3	7	WASPADA	2
11	DKI Jakarta	3	3	3	9	AMAN	3	30	Sulawesi Barat	2	1	1	4	RENTAN	1
12	Jawa Barat	3	2	3	8	AMAN	3	31	Maluku	2	1	2	5	RENTAN	1
13	Jawa Tengah	3	2	3	8	AMAN	3	32	Maluku Utara	2	2	3	7	WASPADA	2
14	DI Yogyakarta	3	2	2	7	WASPADA	2	33	Papua	3	3	2	8	AMAN	3
15	Jawa Timur	3	2	3	8	AMAN	3	34	Papua Pegunungan	3	1	2	6	WASPADA	2
16	Banten	2	3	3	8	AMAN	3	35	Papua Selatan	2	3	1	6	WASPADA	2
17	Bali	2	3	3	8	AMAN	3	36	Papua Tengah	2	2	2	6	WASPADA	2
18	Nusa Tenggara Barat	3	2	2	7	WASPADA	2	37	Papua Barat	2	2	1	5	RENTAN	1
19	Nusa Tenggara Timur	3	3	1	7	WASPADA	2	38	Papua Barat Daya	2	3	1	6	WASPADA	2

Keterangan :
 - IK : Indeks Ketersediaan - Skor Komposit Bulanan : IK + IA + IP
 - IA : Indeks Akses
 - IP : Indeks Pemanfaatan

STATUS RENTAN

➤ INDEKS KETERSEDIAAN KONDISI RENTAN

- 1. Sumatera Barat
- 2. Lampung
- 3. Kalimantan Timur

REKOMENDASI TINDAK LANJUT:

1. Tingkatkan kewaspadaan terhadap harga dan stok gabah/beras melalui pemantauan harga dan stok pada bulan berjalan hingga 4 bulan ke depan
2. Pemantauan stok cadangan pangan pemerintah pusat dan daerah dan cadangan pangan masyarakat (petani, penggilingan, pedagang)
3. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian atau OPD yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pertanian terkait penyediaan benih unggul (tahan kekeringan/banjir dan umur super genjah), saprodi, jaminan/asuransi pertanian, penyediaan sumur dangkal/pompa dan embung
4. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar dan Gerakan Pangan murah (GPM), serta distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit
5. Lakukan evaluasi terhadap langkah intervensi bulanan

REKOMENDASI TINDAK LANJUT DISEBABKAN LUAS PUSO:

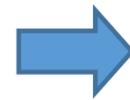
1. Memberi rekomendasi melakukan Upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim oleh OPD yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pertanian provinsi dan kabupaten/kota
2. Koordinasi dengan BNOB dan BPBD untuk memastikan antisipasi puso akibat bencana

REKOMENDASI TINDAK LANJUT DISEBABKAN LUAS TANAM:

1. Melakuksn investigasi penyebabnya dan Upaya segera untuk meningkatkan luas tanam bulan berikutnya
2. Mendorong peningkatan indeks pertanaman
3. Koordinasi Kementerian Pertanian atau OPD yang melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi di bidang pertanian terkait penyediaan benih unggul (tahan kekeringan/banjir dan umur super genjah), saprodi, jaminan/asuransi pertanian, penyediaan sumur dangkal/pompa dan embung
2. Percepatan tanam untuk mengantisipasi perubahan iklim
3. Penanaman kembali (*re-planting*) lokasi pertanaman terdampak puso

STATUS WASPADA

➤ **INDEKS KETERSEDIAAN KONDISI WASPADA**



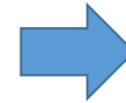
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Sumatera Utara | 9. Gorontalo |
| 2. Bengkulu | 10. Sulawesi Barat |
| 3. Bangka Belitung | 11. Maluku |
| 4. Banten | 12. Maluku Utara |
| 5. Bali | 13. Papua Selatan |
| 6. Kalimantan Barat | 14. Papua Tengah |
| 7. Kalimantan Tengah | 15. Papua Barat |
| 8. Sulawesi Utara | 16. Papua Barat Daya |

REKOMENDASI TINDAK LANJUT:

1. Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena berkurangnya luas tanam akibat alih fungsi lahan dan terjadinya puso akibat bencana dan iklim
2. Meningkatkan kewaspadaan terhadap harga dan stok gabah/beras melalui pemantauan harga dan stok pada bulan berjalan hingga 4 bulan ke depan, khususnya di daerah kabupaten/kota yang berstatus waspada.
3. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.
4. Koordinasi dengan Kementerian Pertanian atau OPD pertanian daerah terkait penyediaan benih unggul, saprodi, jaminan/asuransi pertanian, penyediaan sumur dangkal/pompa dan embung.
5. Koordinasi dengan BNPB dan BPBD untuk memastikan antisipasi puso akibat bencana dan iklim.
6. Memberi rekomendasi untuk melakukan upaya pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) oleh OPD yang menangani urusan pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota

STATUS RENTAN

➤ INDEKS KETERJANGKAUAN KONDISI RENTAN



1. Aceh
2. Sulawesi Utara
3. Sulawesi Barat
4. Maluku
5. Papua Pegunungan

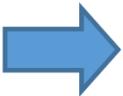
REKOMENDASI TINDAK LANJUT:

1. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar atau Gerakan Pangan murah (GPM) dan distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit
2. Koordinasi dengan tim pengendali inflasi pusat dan daerah
3. Koordinasi dengan OPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan untuk mewaspadaai kemungkinan peningkatan persentase balita underweight dan penurunan persentase balita yang naik berat badannya pada **1-2 bulan** berikutnya melalui monitoring penimbangan berat badan balita tiap bulan

REKOMENDASI SESUAI HASIL SKPG PER PILAR(4/6)

STATUS WASPADA

➤ **INDEKS KETERJANGKAUAN KONDISI WASPADA**



- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Sumatera Utara | 12. Nusa Tenggara Barat |
| 2. Riau | 13. Kalimantan Tengah |
| 3. Jambi | 14. Kalimantan Utara |
| 4. Sumatera Selatan | 15. Sulawesi Tengah |
| 5. Bengkulu | 16. Sulawesi Selatan |
| 6. Lampung | 17. Sulawesi Tenggara |
| 7. Bangka Belitung | 18. Gorontalo |
| 8. Jawa Barat | 19. Maluku Utara |
| 9. Jawa Tengah | 20. Papua Tengah |
| 10. DI Yogyakarta | 21. Papua Barat |
| 11. Jawa Timur | |

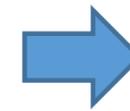
REKOMENDASI TINDAK LANJUT:

1. Wilayah tersebut masuk dalam kategori waspada karena terjadinya kenaikan harga pada komoditas beras, minyak goreng, dan telur ayam
2. Koordinasi pelaksanaan operasi pasar/gerakan pangan murah (GPM) dan distribusi Pangan dari daerah surplus ke daerah defisit
3. Koordinasi dengan OPD yang menyelenggarakan urusan kesehatan untuk mewaspadaai kemungkinan peningkatan persentase balita underweight dan penurunan persentase balita yang naik berat badannya pada **2-4 bulan** berikutnya melalui monitoring penimbangan berat badan balita tiap bulan

REKOMENDASI SESUAI HASIL SKPG PER PILAR(5/6)

STATUS RENTAN

➤ INDEKS PEMANFAATAN KONDISI RENTAN



1. Nusa Tenggara Timur
2. Sulawesi Barat
3. Papua Selatan
4. Papua Barat
5. Papua Barat Daya

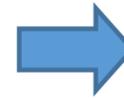
REKOMENDASI TINDAK LANJUT:

1. Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi rentan, karena jumlah persentase balita *underweight* terhadap jumlah seluruh balita lebih dari 15%, yaitu: 20,37% (64.318 balita) di NTT; 20,05% (13.918 balita) di Sulawesi Barat; 17,93% (3.042 balita) di Papua Selatan; 17,41% (2.279 balita) di Papua Barat Daya; dan 17,13% (2.692 balita) di Papua Barat;
2. Untuk mengatasi situasi tersebut, tindak lanjut yang dapat dilakukan berupa:
 - Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengambil tindakan relevan yang diperlukan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal untuk pemulihan atau tindakan lain yang diperlukan untuk balita dengan BB kurang, BB sangat kurang atau balita yang tidak naik berat badannya.
 - Koordinasi lintas sektor untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan kesehatan bagi keluarga balita *underweight* dan balita yang tidak naik berat badannya.

REKOMENDASI SESUAI HASIL SKPG PER PILAR(6/6)

STATUS WASPADA

➤ INDEKS PEMANFAATAN KONDISI WASPADA



1. DI Yogyakarta
2. Nusa Tenggara Barat
3. Kalimantan Barat
4. Kalimantan Selatan
5. Kalimantan Timur
6. Sulawesi Tengah
7. Maluku
8. Papua
9. Papua Pegunungan
10. Papua Tengah

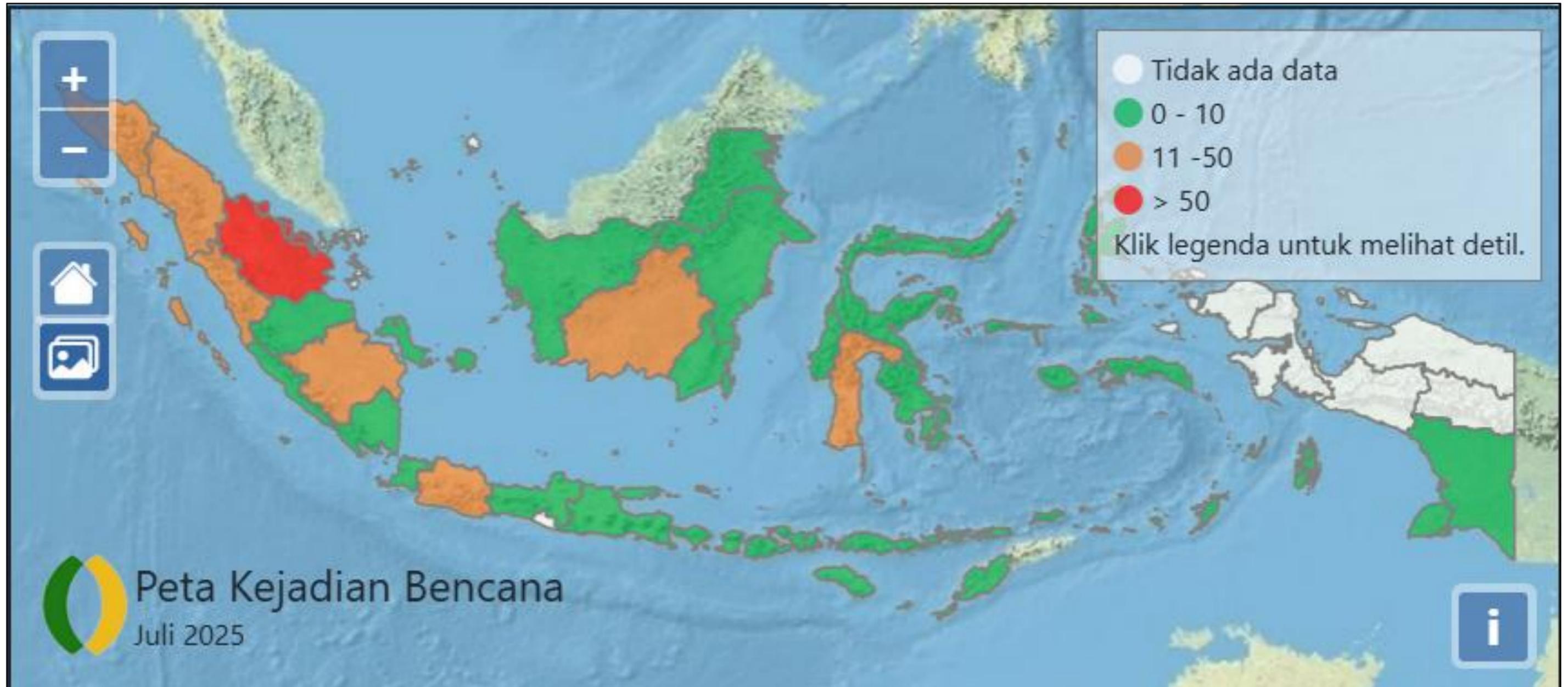
REKOMENDASI TINDAK LANJUT:

1. Aspek pemanfaatan ketiga wilayah tersebut termasuk dalam kondisi waspada, karena jumlah persentase balita *underweight* terhadap jumlah seluruh balita antara 10 - 15%.
2. Melakukan upaya antisipatif memburuknya status Gizi balita pada bulan berikutnya, khususnya untuk kabupaten/kota terlampir.
3. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk persiapan penyaluran bantuan Pangan dengan OPD Kesehatan, Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, BUMN, BUMD, TP PKK dan swasta

Peta Situasi Iklim sebagai Data Dukungan dalam Upaya Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)



Peta Situasi Kejadian Bencana sebagai Data Dukung dalam Upaya Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)



Ringkasan Data Dukung Iklim sebagai Upaya Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) ...(1/2)



No.	PROVINSI	KAB/KOTA POTENSI KERING				KAB/KOTA POTENSI BASAH				KOMPOSIT KAB/KOTA POTENSI BASAH & KERING			
		Kategori Siaga		Kategori Waspada		Kategori Siaga		Kategori Waspada		Kategori Siaga		Kategori Waspada	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
1	Aceh	0	0,00	0	0,00	0	0,00	23	95,83	0	0,00	23	95,83
2	Sumatera Utara	0	0,00	0	0,00	6	18,75	26	81,25	6	18,75	26	81,25
3	Sumatera Barat	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18	100,00	0	0,00	18	100,00
4	Riau	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	100,00	0	0,00	12	100,00
5	Jambi	0	0,00	0	0,00	1	9,09	10	90,91	1	9,09	10	90,91
6	Sumatera Selatan	0	0,00	0	0,00	1	5,88	16	94,12	1	5,88	16	94,12
7	Bengkulu	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	100,00	0	0,00	10	100,00
8	Lampung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	100,00	0	0,00	15	100,00
9	Bangka Belitung	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00	0	0,00	7	100,00
10	Kepulauan Riau	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	100,00	0	0,00	8	100,00
11	DKI Jakarta	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	66,67	0	0,00	4	66,67
12	Jawa Barat	0	0,00	0	0,00	4	14,81	21	77,78	4	14,81	21	77,78
13	Jawa Tengah	0	0,00	0	0,00	4	11,76	28	82,35	4	11,76	28	82,35
14	DI Yogyakarta	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	40,00	0	0,00	2	40,00
15	Jawa Timur	0	0,00	0	0,00	2	5,26	31	81,58	2	5,26	31	81,58
16	Banten	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8	100,00	0	0,00	8	100,00
17	Bali	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	66,67	0	0,00	6	66,67
18	Nusa Tenggara Barat	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	50,00	0	0,00	5	50,00
19	Nusa Tenggara Timur	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	50,00	0	0,00	11	50,00
20	Kalimantan Barat	0	0,00	0	0,00	0	7,00	14	100,00	0	0,00	14	100,00
21	Kalimantan Tengah	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	100,00	0	0,00	14	100,00

Ringkasan Data Dukung Iklim sebagai Upaya Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) ... (2/2)

No.	PROVINSI	KAB/KOTA POTENSI KERING				KAB/KOTA POTENSI BASAH				KOMPOSIT KAB/KOTA POTENSI BASAH & KERING			
		Kategori Siaga		Kategori Waspada		Kategori Siaga		Kategori Waspada		Kategori Siaga		Kategori Waspada	
		Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
22	Kalimantan Selatan	0	0,00	0	0,00	2	15,38	11	84,62	2	15,38	11	84,62
23	Kalimantan Timur	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	100,00	0	0,00	10	100,00
24	Kalimantan Utara	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00	0	0,00	5	100,00
25	Sulawesi Utara	0	0,00	0	0,00	1	6,67	14	93,33	1	6,67	14	93,33
26	Sulawesi Tengah	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13	100,00	0	0,00	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	0	0,00	0	0,00	2	8,33	19	79,17	2	8,33	19	79,17
28	Sulawesi Tenggara	0	0,00	0	0,00	2	11,76	11	64,71	2	11,76	11	64,71
29	Gorontalo	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5	83,33	0	0,00	5	83,33
30	Sulawesi Barat	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6	100,00	0	0,00	6	100,00
31	Maluku	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	100,00	0	0,00	11	100,00
32	Maluku Utara	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10	100,00	0	0,00	10	100,00
33	Papua Barat	0	0,00	0	0,00	1	7,69	12	92,31	1	7,69	12	92,31
34	Papua	0	0,00	0	0,00	1	3,45	28	96,55	1	3,45	28	96,55
Total		0	0,00	0	0,00	27	5,25	444	86,38	27	5,25	444	86,38

KATEGORI	Iklim: Potensi Basah				
Iklim: Potensi Kering	Kategori	Aman	Waspada	Siaga	Awes
	Aman	Aman	Waspada	Siaga	Awes
	Waspada	Waspada	Siaga	Siaga	Awes
	Siaga	Siaga	Siaga	Awes	Awes
	Awes	Awes	Awes	Awes	Awes

- A. AMAN (WARNA HIJAU)** : Kondisi iklim dikategorikan aman jika potensi kering dan basah **keduanya** menunjukkan kategori **aman**
- B. WASPADA (WARNA KUNING)** : Kondisi iklim dikategorikan waspada jika **hanya salah satu** potensi kering atau basah menunjukkan kategori **waspada**
- C. SIAGA (WARNA JINGGA)** : Kondisi iklim dikategorikan siaga jika:
 - 1) **salah satu** potensi kering/ basah: kategori **siaga**; atau
 - 2) potensi kering dan basah **keduanya**: kategori **waspada**
- D. AWES (WARNA MERAH)** : Kondisi iklim dikategorikan siaga jika:
 - 1) **salah satu** potensi kering/basah: kategori **awes**; atau
 - 2) potensi kering dan basah **keduanya** : kategori **siaga**

Detail SKPG Per Provinsi dan Data Dukung Informasi Kebencanaan ... (1/2)

NO	PROVINSI	STATUS SKPG	RISIKO BENCANA	
			Σ KEJADIAN BENCANA	STATUS
1	ACEH	WASPADA	15	
2	SUMATERA UTARA	WASPADA	35	
3	SUMATERA BARAT	WASPADA	16	
4	RIAU	AMAN	90	
5	JAMBI	AMAN	8	
6	SUMATERA SELATAN	AMAN	22	
7	BENGKULU	WASPADA	2	
8	LAMPUNG	WASPADA	6	
9	BANGKA BELITUNG	WASPADA	2	
10	KEPULAUAN RIAU	AMAN		
11	DKI JAKARTA	AMAN	8	
12	JAWA BARAT	AMAN	25	
13	JAWA TENGAH	AMAN	8	
14	DI YOGYAKARTA	WASPADA		
15	JAWA TIMUR	AMAN	5	
16	BANTEN	AMAN	7	
17	BALI	AMAN	3	
18	NUSA TENGGARA BARAT	WASPADA	3	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	WASPADA	1	
20	KALIMANTAN BARAT	WASPADA	5	
21	KALIMANTAN TENGAH	WASPADA	38	
22	KALIMANTAN SELATAN	AMAN	3	

NO	PROVINSI	STATUS SKPG	RISIKO BENCANA	
			Σ KEJADIAN BENCANA	STATUS
23	KALIMANTAN TIMUR	WASPADA	5	
24	KALIMANTAN UTARA	AMAN	5	
25	SULAWESI UTARA	WASPADA	1	
26	SULAWESI TENGAH	WASPADA	9	
27	SULAWESI SELATAN	AMAN	11	
28	SULAWESI TENGGARA	AMAN	5	
29	GORONTALO	WASPADA	4	
30	SULAWESI BARAT	RENTAN	3	
31	MALUKU	RENTAN	3	
32	MALUKU UTARA	WASPADA	1	
33	PAPUA	AMAN		
34	PAPUA PEGUNUNGAN	WASPADA		
35	PAPUA SELATAN	WASPADA	1	
36	PAPUA TENGAH	WASPADA		
37	PAPUA BARAT	RENTAN		
38	PAPUA BARAT DAYA	WASPADA		

Status Warna	Σ Kejadian Bencana	Jumlah Provinsi	Persentase (%)
	0	7	18,42
	1-10	23	60,53
	11-50	7	18,42
	50+	1	2,63

Rekapitulasi Kejadian Bencana Di Bulan Juli 2025 ... (2/2)

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Presentase (%)
1	Kebakaran Hutan dan Lahan	235	67,14
2	Banjir	63	18,00
3	Cuaca Ekstrem	26	7,43
4	Tanah Longsor	13	3,71
5	Kekeringan	7	2,00
6	Gempa Bumi	3	0,86
7	Erupsi Gunung Berapi	1	0,29
8	Tsunami	2	0,57
	TOTAL	350	100,00

- Kejadian bencana di bulan Juli didominasi akibat kebakaran hutan dan lahan sebanyak 235 kejadian (67,14%), dan akibat banjir sebanyak 63 kejadian (18%) dari total kejadian bencana sejumlah 350 kejadian.

Informasi Kebencanaan



BENCANA INDONESIA 2025

Jumlah kejadian bencana per tanggal 31 Juli 2025 tercatat sebanyak 2.049 kejadian. Kejadian bencana alam mendominasi adalah Bencana hidrometeorologi 98,98% dan bencana geologi 0,73% dengan urutan bencana banjir, cuaca ekstrem, karhutla, tanah longsor dan erupsi gunungapi

BNPB

SEBARAN KEJADIAN BENCANA ALAM PERIODE 1 JANUARI - 31 JULI 2025

TOTAL BENCANA TAHUN 2025
Update 31 Juli 2025

2.049



Jumlah Kejadian

- < 50
- 50 - 150
- > 150

DAMPAK BENCANA ALAM PERIODE 1 JANUARI - 31 JULI 2025

MENINGGAL DUNIA	298
HILANG	28
LUKA - LUKA	490
MENDERITA & MENGUNGSI	4.589.994

JUMLAH KEJADIAN PER-JENIS BENCANA TAHUN 2025

BENCANA ALAM

GEMPA BUMI	11
ERUPSI GUNUNGAPI	4
TSUNAMI	1
BANJIR	1.138
CUACA EKSTREM	402
KARHUTLA	309
TANAH LONGSOR	163
GELOMBANG PASANG & ABRASI	10
KEKERINGAN	11

DAMPAK KERUSAKAN AKIBAT BENCANA ALAM TAHUN 2025

RUMAH RUSAK - TOTAL : 23.135 UNIT	FASILITAS RUSAK - TOTAL : 475 UNIT	KANTOR & JEMBATAN RUSAK - TOTAL : 245 UNIT
RUMAH RUSAK BERAT 3.097	SATUAN PENDIDIKAN RUSAK 278	KANTOR RUSAK 17
RUMAH RUSAK SEDANG 4.887	RUMAH IBADAT RUSAK 162	JEMBATAN RUSAK 228
RUMAH RUSAK RINGAN 15.151	FASILITAS YANKES RUSAK 35	

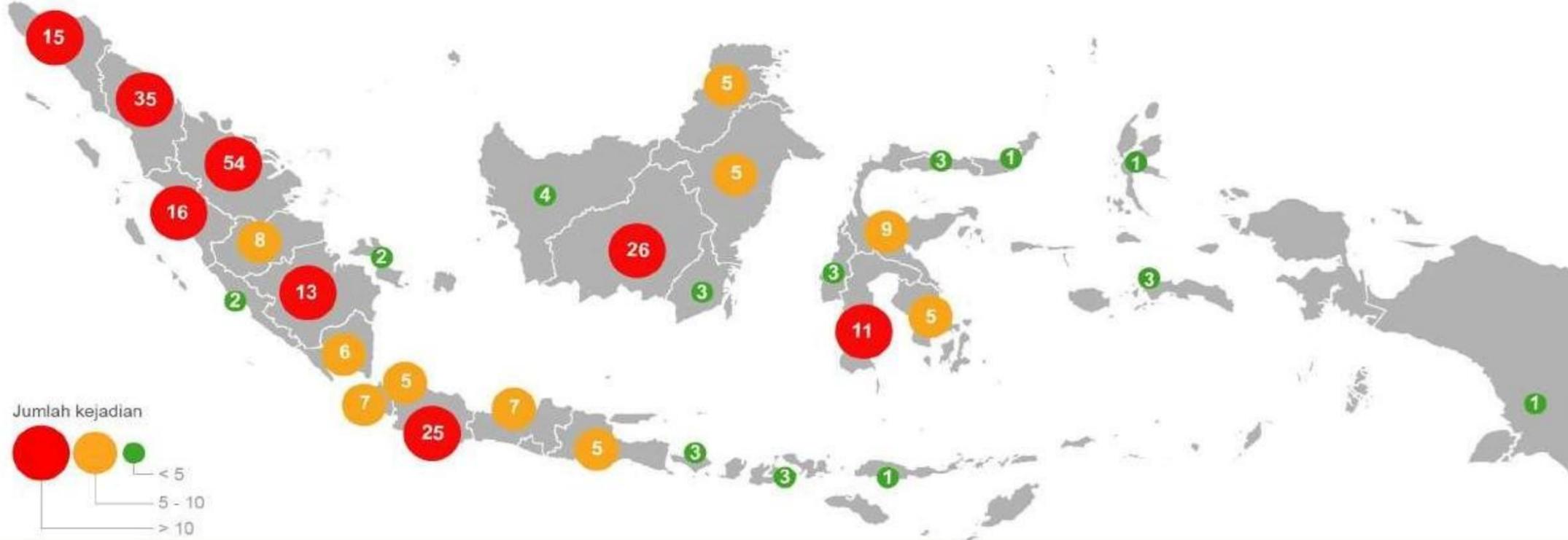
No: 8/U191/099/Ben-Indonesia/BNPB/31072025

Infografis Kejadian Bencana (Juli 2025)



Selama bulan Juli 2025 telah terjadi 287 kejadian bencana yang menyebabkan 20 orang meninggal, 1 orang hilang dan 39 orang luka/sakit. Secara kumulatif, lebih dari 212.387 orang menderita & mengungsi. Bencana juga telah mengakibatkan 1.534 unit rumah mengalami kerusakan. Kejadian bencana didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang dominan terjadi di bulan Juli. Korban meninggal paling banyak diakibatkan bencana tanah longsor. Kerusakan rumah paling banyak disebabkan oleh bencana cuaca ekstrem.

Peta Kejadian Bencana Bulan Juli 2025

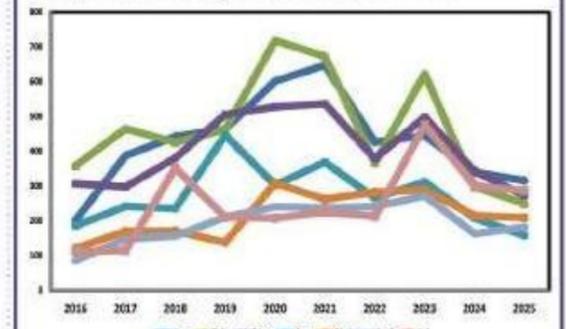


Rekapitulasi Kejadian Bencana

Periode: 1 Januari - 31 Juli 2025

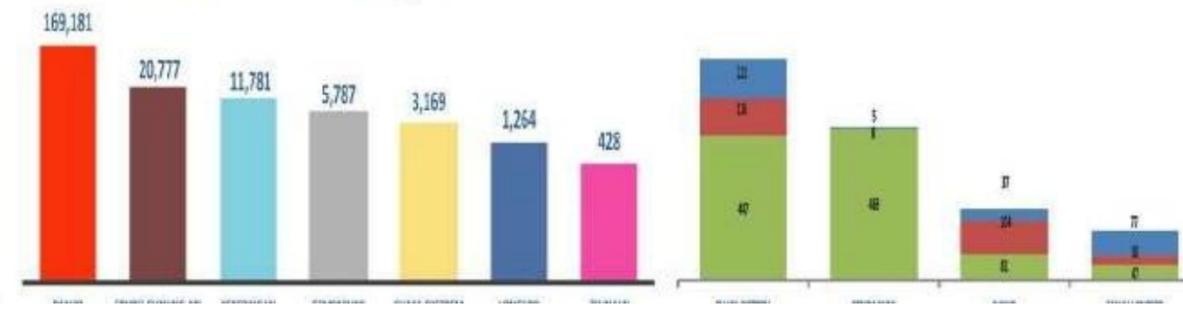
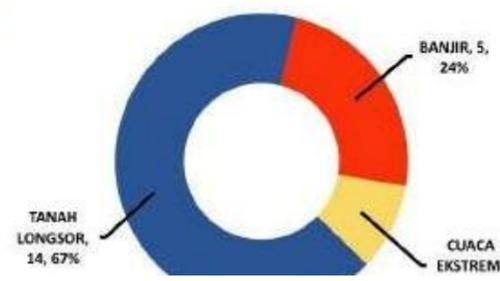
- 2.068** kejadian bencana
- Menderita dan Mengungsi: **4.597.948 jiwa**
- Meninggal dan hilang: **329 jiwa**
- 23.184** Rumah rusak
- 3.099 unit** Rumah Rusak Berat
- 4.887 unit** Rumah Rusak Sedang
- 15.198 unit** Rumah Rusak Ringan

Perbandingan Jumlah Kejadian Bencana Bulan Januari - Juli periode Tahun 2016 - 2025

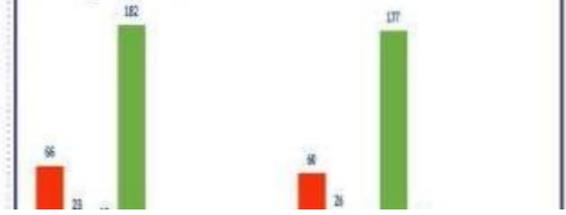


Data Kejadian Bencana Bulan Juli 2025

- Jumlah Kejadian Bencana: **287 kejadian**
- Jumlah Korban Meninggal & Hilang: **21 jiwa**
- Persentase Korban yang Menderita & Mengungsi diakibatkan oleh Banjir: **79,66%**
- Persentase Kerusakan Rumah diakibatkan oleh cuaca ekstrem: **44,59%**



Perbandingan Kejadian Bencana Banjir, Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem, Gelombang Pasang & Abrasi, Kebakaran Hutan & Lahan, Kekeringan, Gempa Bumi, Erupsi Gunung Api, dan Tsunami Bulan Juli 2024 dan 2025





**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

**NATIONAL
FOOD
AGENCY**

Instagram

<http://www.instagram.com/badanpangannasional/>

Facebook

<https://www.facebook.com/badanpangan/>

Twitter

<https://twitter.com/Badan Pangan>

Youtube

<http://www.youtube.com/channel/UCT9nnYOnvZtLyiiH9qmwSEg>

Tiktok

<https://www.tiktok.com/@badanpangannasional>

